

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kebijakan Publik

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kebijakan publik sebagai “serangkaian konsep dan prinsip yang menguraikan dan merencanakan pelaksanaan suatu pekerjaan serta cara bertindak”. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tujuan dan pedoman untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Seperti yang dijelaskan oleh Thomas R. Dye (dalam Dewi, 2016: 17) Apapun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan adalah kebijakan negara atau kebijakan publik. Ini mengacu pada tindakan apapun yang diambil oleh pemerintah, terlepas dari apakah itu mengambil tindakan sama sekali. Definisi ini dapat beralasan bahwa pilihan diambil dengan mengikuti sesuatu atau tidak mencapai sesuatu adalah strategi.

Hogerweft mengatakan bahwa kebijakan publik berusaha melakukan hal-hal tertentu dengan alat-alat tertentu dan dalam urutan tertentu. (Ichsan, 2019:31) Sedangkan menurut Friedrich (dalam Taufiqurakhman, 2014:2), Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok (pemerintah) sebagai respons terhadap peluang atau tantangan lingkungan. Kebijakan digunakan untuk mengatasi hambatan atau masalah yang muncul dalam menggapai tujuan tertentu. Pendapat ini menunjukkan bahwa sebagian besar definisi kebijakan mencakup perilaku dengan tujuan dan sasaran. Menurut David Easton (dalam Anggara, 2014:35) kebijakan publik ini merupakan proses pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada masyarakat. Dari pendapat tersebut

dapat dilihat bahwasanya sebuah kebijakan memiliki nilai nilai yang dapat direalisasikan terhadap masyarakat. Kebijakan publik juga memiliki beberapa karakteristik seperti yang dikemukakan oleh Agustino (dalam Ichsan, 2019:32) diantaranya adalah:

1. Perhatian kebijakan publik biasanya difokuskan pada tindakan dengan tujuan tertentu.
2. Kebijakan publik pada dasarnya terdiri dari bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Misalnya, suatu kebijakan juga mencakup pelaksanaan dan implementasi, bukan hanya hasil dari peraturan tertentu.
3. Dalam konteks regulasi perdagangan dan pengendalian inflasi, kebijakan publik mengacu pada apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang ingin dilakukan atau akan dilakukan. Apa yang dapat atau akan terjadi setelah implementasi suatu kebijakan ditunjukkan oleh kebijakan publik.
4. Kebijakan publik memiliki potensi positif ataupun negatif. Positif dalam hal ini adalah respon pemerintah yang jelas terhadap suatu masalah. Keputusan pemerintah untuk tidak melakukan apa-apa untuk menyelesaikan masalah, meskipun peran pemerintah diperlukan dalam situasi ini, termasuk dalam definisi negatif.
5. Kebijakan publik adalah perkembangan kegiatan yang diselesaikan atau tidak dilakukan oleh otoritas publik yang diarahkan pada tujuan tertentu untuk memiliki pilihan untuk mengurus masalah publik dan selanjutnya untuk kepentingan publik. Agar memaksa atau mengikat, kebijakan biasanya mencakup ketentuan atau undang-undang yang dirancang oleh pemerintah.

a. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Wahab (dalam Mustari, 2015: 38) Ciri-ciri khusus yang terdapat dalam kebijakan publik didasarkan pada fakta bahwa kebijakan tersebut dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki otoritas dalam sistem politik, seperti pemerintah (eksekutif, legislatif, dll). Ciri-ciri tersebut dikenal dengan ciri-ciri kebijakan publik. Orang-orang ini bertanggung jawab atas politik dan memiliki wewenang untuk bertindak sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.

Ciri-ciri kebijakan publik menurut Wahab (dalam Mustari, 2015:38) diantaranya adalah:

1. Kebijakan publik adalah aktivitas yang mendorong tujuan, bukan cara berperilaku yang sewenang-wenang dan kebetulan atau aktivitas, namun aktivitas yang diatur;
2. Pada hakekatnya, kebijakan publik terdiri dari tindakan-tindakan yang berkaitan satu sama lain dan dirancang untuk mengacu pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Itu tidak terdiri dari keputusan yang berdiri sendiri dan tidak memiliki dasar. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang tetapi juga yang terkait dengan implementasinya dan penggunaan kekuatan selama implementasinya;
3. Setiap kebijakan pemerintah diikuti dengan tindakan-tindakan tertentu, maka kebijakan berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah di daerah tertentu.

2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan

Salah satu langkah penting dalam proses analisis kebijakan publik adalah implementasi kebijakan; dengan kata lain, implementasi kebijakan pada hakekatnya merupakan bagian dari proses administrasi publik. Dalam kaitannya dengan administrasi publik, Keban (dalam Nurdin, 2019:17-18) mengidentifikasi enam dimensi yang harus diperhatikan:

1. Proses pengambilan keputusan untuk menentukan tujuan dan metode alternatif terbaik untuk mencapai tujuan terkait dengan dimensi kebijakan;

2. Dimensi struktur organisasi, yang berkaitan dengan penataan struktur meliputi pembentukan unit-unit, pembagian tugas antar unit, dalam hal ini lembaga publik untuk mencapai tujuan serta menetapkan wewenang dan tanggung jawab;

3. Dimensi manajemen berkaitan dengan proses pergerakan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan yang telah dirancang untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen;

4. Pemberian arahan moral kepada administrator tentang apa yang benar dan salah atau apa yang baik dan buruk merupakan komponen dari dimensi etika.

5. Situasi dan kondisi sekitarnya, yang berdampak pada semua dimensi lainnya, adalah subyek dari dimensi lingkungan.

6. Komponen tanggung jawab pelaksanaan berkaitan dengan pemberian bukti substansial tentang keberadaan dan pemanfaatan otoritas publik yang melengkapi kemampuan manajemen kebijakan di suatu negara.¹

Terkait dengan proses pengambilan keputusan untuk menentukan tujuan dan metode alternatif terbaik, implementasi termasuk dalam dimensi kebijakan.

¹Nurdin, Encep. 2019. Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan. Bandung. CV Maulana Media Grafika. hlm 18.

Proses implementasi pada hakekatnya akan berkaitan dengan pandangan mengenai dimensi administrasi publik (pada umumnya) dan kebijakan publik (pada khususnya). Untuk menganalisis lebih jelas pentingnya implementasi, menurut Gordon (dalam Nurdin, 2019: 19) Implementasi adalah proses pengorganisasian, interpretasi, dan pelaksanaan kebijakan tertentu untuk mencapai tujuan program. Menurut tokoh ini, hakikat implementasi adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya, khususnya perumusan kebijakan.²

Suatu kebijakan dengan tujuan yang telah berhasil diformulasikan tanpa diiringi dengan proses implementasi akan menjadi tidak optimal. Tanpa adanya proses implementasi, sebuah kebijakan yang dirumuskan dalam dokumen tertulis secara lengkap dan sistematis tidak akan berarti apa-apa. Dan juga apabila implementasi kebijakan tanpa didasari dengan formulasi tujuan yang jelas akan berujung pada ketidakberaturan. Adapun tujuan ataupun makna dari formulasi tujuan yang jelas adalah (1) tujuan tersebut tidak memiliki makna ganda atau ambigu; dan (2) tujuan suatu kebijakan dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Edwards (dalam Nurdin, 2019: 19) “Mungkin akan gagal bagaimanapun baiknya penerapannya jika tidak dapat mengatasi masalah yang dirancangnya.” Bahkan jika suatu kebijakan diterapkan dengan cara yang benar, akan menjadi kesalahan jika tidak menyelesaikan masalah yang mengilhami penciptaannya.³

2.1.1.1 Model Analisis Implementasi Merilee S Grindle

² ibid, hlm 19.

³ ibid, hlm 19.

Untuk dapat membedah implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap Pasar Hewan Ternak Manonjaya dibutuhkan analisis khusus seperti analisis model Merilee Grindle. Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan pada latar belakang skripsi ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan pada pelaksanaannya di lapangan tidak selalu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selalu ada celah ataupun kelalaian baik disengaja maupun tidak disengaja yang berkaitan dengan wewenang pemerintah daerah setempat. Maka penulis memilih model Grindle ini sebagai alat untuk dapat membedah permasalahan yang ada.

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Nurdin, 2019: 63) Sebuah konsep atau model dibuat dengan maksud untuk menciptakan proses generalisasi dengan menggunakan bahan studi kasus untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa isi dan konteks suatu kebijakan relevan. Untuk memahami konsep implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, pertama-tama kita harus memahami pandangan Grindle tentang implementasi, isinya, dan konteksnya.

Menurut Grindle (dalam Nurdin, 2019: 63) Secara umum, tujuan dari proses implementasi kebijakan adalah untuk membangun jaringan agar tujuan kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah.⁴ Menurut pemahamannya, program diartikan sebagai strategi untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan proses implementasi kebijakan dapat dinilai dari segi keterlaksanaan program yang dibuat.

“...proses pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh macam-macam tujuan yang telah ditentukan untuknya dan cara penetapan tujuan tersebut,” saran

⁴ ibid, hlm 65.

Grindle mengenai proses pelaksanaan (dalam Nurdin, 2019:66). Hal ini menunjukkan bahwa sifat dan cara di mana tujuan telah dinyatakan memiliki dampak yang signifikan terhadap proses implementasi. Dua faktor, isi kebijakan dan konteksnya, menentukan dan mempengaruhi keberhasilan kegiatan untuk mengimplementasikan kebijakan.

1. Materi Muatan Kebijakan (*The content of policy*)

Beberapa subvariabel yang berdampak langsung pada proses implementasi kebijakan dimasukkan ke dalam variabel materi muatan kebijakan ini. Sub faktor yang mempengaruhi kemajuan eksekusi strategi adalah kepentingan yang terkena dampak (*Interest Affected*); berbagai jenis keuntungan (*type of benefits*); sejauh mana perubahan yang diantisipasi (*Extended of change envisioned*); dimana kebijakan dibuat (*Site of Decision Making*); programmer (*program implementors*); dan sumber daya yang telah disepakati (*resources committed*).

a. Kepentingan yang terpengaruhi (*interest affected*)

Jenis kebijakan dan jumlah aktivitas politik berjalan beriringan, Grindle (dalam Nurdin, 2019: 67-68) memberikan gambaran tentang kepentingan yang terpengaruh ini, yang menyatakan bahwa orang-orang yang meyakini kepentingannya dalam bahaya akan menolak setiap tindakan politik yang mengubah hubungan sosial, politik, dan ekonomi. Indikator ini menunjukkan seberapa banyak kepentingan yang terikat untuk terlibat dalam proses implementasi kebijakan dan seberapa besar kepentingan tersebut dapat mempengaruhinya.

b. Ragam Manfaat (*type of benefits*)

Jika dibandingkan dengan program yang tidak ada manfaatnya dan pada akhirnya akan memperparah keadaan masyarakat yang terkena dampak, program yang menawarkan berbagai manfaat bagi masyarakat luas cenderung terhindar dari konflik atau perselisihan di kemudian hari.

c. Sejauh mana perubahan yang dibayangkan (*extended of change envisioned*)

Dalam hal ini, Grindle menekankan bahwa program dengan tujuan jangka panjang akan lebih sulit untuk diterapkan daripada program yang benar-benar memberikan manfaat langsung kepada penerima manfaat.

d. Letak pengambilan keputusan (*site of decision making*)

“Seiring dengan semakin tersebarnya lokasi implementasi, baik secara geografis maupun organisasional, tugas pelaksanaan program tertentu menjadi lebih sulit, mengingat bertambahnya unit-unit pengambil keputusan yang terlibat,” tegas Grindle mengenai lokasi pengambilan keputusan (dalam Nurdin, 2019:69). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu program atau kebijakan akan lebih sulit jika tersebar secara geografis dan organisasional.

e. Para pelaksana program (*program implementors*)

Implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh siapa yang ditunjuk dan berwenang melaksanakan program, khususnya sebagai pelaksana. Menurut Grindle (dalam Nurdin, 2019: 71) “Keputusan yang dibuat selama perumusan kebijakan juga dapat menunjukkan siapa yang akan ditugaskan untuk mengimplementasikan berbagai program, dan keputusan tersebut dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan,”. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh keputusan

mengenai siapa yang bertanggung jawab atas implementasi program yang telah dirumuskan pada tahap perumusan kebijakan.

f. Sumber daya yang disepakati (*resources committed*)

Bentuk dan jenis sumber daya yang ada dalam muatan isi kebijakan ini tidak dijelaskan secara rinci oleh Grindle mengenai apa sumber daya.

2. Konteks Kebijakan (*The context of policy*)

Dalam hal ini, konteks suatu kebijakan mempengaruhi implementasi kebijakan. Selain itu, isi kebijakan dianggap sebagai variabel penting yang mempengaruhi hasilnya. Berbagai subvariabel yang dihadirkan Grindle (dalam Nurdin, 2019: 72) meliputi kekuatan aktor, kepentingan, dan strategi (*power, interest and strategies of actors involved*); ciri-ciri lembaga dan rezim yang sedang berkuasa (*institution and regime characteristics*); serta sejauh mana orang responsif dan patuh (*compliance and responsiveness*).

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (*power, interest and strategies of actors involved*)

Pada proses implementasi, banyak dari aktor yang berupaya untuk mempengaruhi para pihak dalam proses pengambilan keputusan. Kekuasaan implementor, baik pada tingkat atasan maupun bawahan, nasional, regional, maupun lokal dalam hal ini memegang peranan yang cukup signifikan. Masing-masing implementor memiliki kepentingannya masing-masing terhadap program yang dijalankan. Hal ini memungkinkan adanya konflik terjadi karena tujuan pribadi dari para aktor.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*institution and regime characteristics*)

Karakteristik lembaga dan rezim dapat menentukan nasib implementasi kebijakan. Dalam artian rezim yang berkuasa memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan implementasi suatu program yang masuk dalam pemerintahan. Untuk dapat melihat ataupun menentukan ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implementor dari kebijakan pemerintah dapat dilihat dari keberpihakan ataupun dari gaya kepemimpinan dari pemerintah daerah yang berkuasa. Karakteristik dari lembaga harus berdasar kepada standar dan kompetensi yang baik guna meminimalisir kegagalan dalam proses implementasi kebijakan.

c. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap dari pelaksana (*compliance and responsiveness*)

Menurut Grindle (dalam Nurdin, 2019:75) untuk dapat mencapai tujuan suatu kebijakan, pejabat publik mendapati dua masalah yang berkenaan dengan interaksi mereka terhadap lingkungan dan tahapan administrasi, yakni dalam hal kepatuhan dan juga ketanggapan. Terdapat beberapa cara yang dijelaskan oleh Grindle dalam menyelesaikan masalah tersebut. Para aktor harus merubah pemikiran orang-orang yang sebelumnya menentang mengenai kebijakan menjadi mendukung. Selain itu para aktor juga harus mempertahankan orang-orang yang mendapati manfaat dari pelaksanaan program. Selain kepatuhan, permasalahan lainnya adalah ketanggapan. Semua tingkatan dari birokrasi pada setiap institusi harus memiliki daya tanggap yang cepat dalam pekerjaannya guna memberikan pelayanan publik yang maksimal dan dapat memenuhi kebutuhan secara optimal.

Tanpa adanya ketanggapan ini sulit untuk dapat mewujudkan implementasi kebijakan.

2.2. Konsep Pemerintahan

Menurut Wilson (dalam Monika, 2013:30) pemerintah merupakan suatu kekuatan yang diorganisir artinya pemerintah ini merupakan sekumpulan orang atau kelompok yang dipersiapkan untuk merealisasikan kepentingan bersama dalam hal ini pemerintah berfungsi untuk memberikan keterangan pada persoalan di masyarakat.

Kemudian menurut Hadari Nawawi (dalam Monika, 2013:30) Sebagai entitas nirlaba, negara atau pemerintah melayani individu dan kelompok masyarakat dengan pelayanan. Pemerintah dituntut untuk mampu mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai pelaksana pembangunan. Menurut Ndraha (dalam labolo, 2014:34) terkait dengan pelayanan, pemerintah menjalankan fungsinya dengan dikelompokkan menjadi layanan sipil dan juga jasa publik. Fungsi tersebut dapat diartikan bahwasanya pemerintah melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil. Pemerintah mendirikan sejumlah lembaga yang lebih kecil untuk menyediakan layanan publik dan mempromosikan pembangunan di bidang-bidang seperti pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan, antara lain, untuk menjangkau unit terkecil masyarakat.

Dalam mengidentifikasi fungsi pemerintah dalam membangun kesejahteraan, Menurut Halim (dalam Monika, 2013:24) terdapat empat bentuk diantaranya adalah :

- a. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan mendasar yang nantinya akan digunakan masyarakat sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan bermasyarakat;
- b. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan perubahan sosial ke arah pembaharuan sebagai modernizer;
- c. Pemerintah berusaha menciptakan lingkungan yang tertib, nyaman, dan aman serta tersedianya sarana dan prasarana pembangunan sebagai fasilitator;
- d. Pemerintah harus dapat memberikan contoh atau teladan nyata kepada masyarakat agar dapat berperan sebagai stimulan dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama.

Fokus utama pemerintah daerah adalah kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan strategis semua potensi, terutama di pasar yang menyediakan mata pencaharian masyarakat kelas menengah dan bawah. Oleh karena itu, fungsi pemerintah daerah sebagai institusi pemerintah adalah untuk meningkatkan daya saing pasar ternak di Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Untuk menyelesaikan persoalan pasar dengan cepat, pemerintah daerah ini, khususnya pemerintah kabupaten, harus selalu merespon semua tuntutan masyarakat secara efektif.

2.2.1 *Governance, Good Governance dan Governability*

Tussman (dalam Ichsan, 2019: 18) berpendapat bahwa “*administrasi oleh yang terbaik di antara kita semua oleh yang terbaik di dalam diri kita masing-masing*”, menyiratkan bahwa otoritas publik harus dijalankan oleh individu-individu terbaik dari setiap orang di negara ini. Ini adalah hasil dari sistem

administrasi publik yang melayani seluruh masyarakat. Kemudian, menurut Pinto (dalam Ichsan, 2019:18) *Governance* adalah proses dimana pemerintah mengatur pemerintahan secara umum dengan mendistribusikan kekuasaan dan wewenang.

Tata kelola yang baik tersirat dalam istilah "*good governance*". Gagasan administrasi itu sendiri pada dasarnya terkait dengan interaksi yang dinamis dan pelaksanaannya, administrasi berlaku dan diselenggarakan di semua tingkat negara. Zuhro menegaskan (dalam Saputra & Nugroho, 2021:13) bahwa "*tata pemerintahan yang baik*" mengacu pada tata cara pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Institusi publik yang produktif, terbuka, lugas dan bertanggung jawab pada berbagai tingkat pemerintahan juga selama waktu yang dihabiskan untuk memutuskan;
- 2) Penggunaan sumber daya manusia, keuangan, dan ekonomi secara efektif untuk mencapai pembangunan yang adil dan berjangka panjang;
- 3) Pembangunan masyarakat demokratis yang diatur sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia;
- 4) Keterlibatan individu dalam proses pengambilan keputusan;
- 5) Menggunakan prosedur hukum untuk menegakkan hak dan kewajiban dengan penegakan hukum

Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah yang selama ini dituding sebagai pemegang kekuasaan sekaligus penyelenggara urusan publik

menyebabkan berkembangnya konsep good governance.⁵ Pelayanan publik juga menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintah dalam bekerja sebagai birokrasi. Integritas diperlukan bagi institusi pemerintah untuk membangun lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, dan keamanan..

2.3. Konsep Pasar

Menurut teori ekonomi, pasar adalah suatu keadaan di mana pembeli dan penjual melakukan transaksi setelah menyepakati harga untuk jumlah barang dan kualitas tertentu. Transaksi pasar menguntungkan kedua belah pihak dari kegiatan ini. Pembeli akan mendapatkan produk yang ideal untuk mengatasi masalah mereka dan mengingat bahwa penjual akan mendapatkan bayaran dari kegiatan ekonomi ini. Dalam sudut pandang pasar secara fisik diartikan sebagai lokasi ataupun tempat bertemunya pedagang dan juga pembeli baik jual beli barang maupun jasa tertentu. Menurut William J Stanton (dalam Fatmasari, 2016:2) Orang yang ingin bahagia, memiliki uang untuk dibelanjakan, dan rela membelanjakannya dianggap sebagai bagian dari pasar. Dari definisi tersebut terdapat beberapa komponen penting yaitu daya beli, pembeli dan perantara (perseorangan) dan selanjutnya keinginan untuk berbelanja. Dilihat dari karakteristik pasar, Pasar Hewan Ternak Manonjaya ini termasuk kedalam pasar tradisional. Menurut Rutz (dalam Aliyah, 2020:1) pasar tradisional merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi kerakyatan yang masih memiliki hubungan interaksi yang akrab antara pedagang dan juga pembeli, pedagang dengan

⁵Maryam, 2016. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. 6(1), Hlm 4.

pedagang, pedagang dan pemasok sehingga mampu membentuk lingkungan sosial ekonomi yang khas.

1. Fungsi Pasar

Fungsi – fungsi pasar berdasarkan USDRP (*Urban Sector Development Reform Project*) atau program reformasi pembangunan, 2009 :

a. Fungsi Pengembangan Ekonomi Masyarakat,

Adapun 4 fungsi ekonomi yang diperankan oleh pasar tradisional adalah;

1. Memungkinkan masyarakat kecil sekalipun untuk mengakses pasar tradisional yang menjual barang atau memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang relatif murah;
2. Mayoritas pedagang dengan modal terbatas dapat mengakses pasar tradisional dengan lebih mudah.
3. Melalui keuntungan dari operasi pasar, pasar dapat meningkatkan PAD.
4. Pasar adalah cara untuk mendistribusikan kekayaan yang juga dapat mengarah pada penciptaan bisnis dan pekerjaan berbasis jasa;
5. Sebagai tempat berkumpulnya kegiatan ekonomi, pasar berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi baik daerah maupun nasional.

b. Fungsi Sosial Kemasyarakatan

1. Pasar memiliki nilai nilai budaya masyarakat lokal yang saling tergantung dan saling membutuhkan;

2. Masyarakat memanfaatkan pasar sebagai tempat interaksi sosial dan diskusi pemecahan masalah.

c. Fungsi Pelayanan Publik

Berdasarkan tujuan penyelenggaraan otonomi yang seluas-luasnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemerintah harus memenuhi tanggung jawabnya untuk menyediakan sarana dan prasarana publik guna mencapai tujuan ekonomi. Selain itu, dalam hal keberlangsungan pasar, pengelolaan pasar perlu dilakukan secara profesional dan manajemen yang baik agar operasi pasar dapat dibiayai dengan pendapatan dari operasi pasar itu sendiri tanpa membebani APBD.⁶

2. Indikator Pengelolaan Pasar yang baik

Menurut Departemen Perdagangan (dalam Monika, 2013: 32) memberikan beberapa indikator tentang keberhasilan pasar tradisional diantaranya adalah :

a. Manajemen yang Transparan

Artinya bersifat terbuka bagi semua pihak dan juga mudah untuk diakses serta tegas dalam menegakkan peraturan bagi yang melanggar.

2. Keamanan Pasar

⁶Salestri, Monika. 2013. "*Peran Pemerintah dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional, Studi Kasus : Pasar Tradisional Piyungan di Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY*". SKRIPSI. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Halaman 27-29.

Keamanan pasar menjadi hal yang penting bagi kelangsung kehidupan di pasar sehingga dalam kenyataannya pelaku usaha dapat berinteraksi dengan konsumen dengan perasaan aman. Satuan keamanan dan juga para pedagang harus saling bekerja sama untuk dapat mengedepankan keamanan bersama.

3. Sampah Pasar

Kebersihan pasar akan membuat kenyamanan bagi para konsumen yang datang ke pasar. Oleh karena itu, pasar yang bersih dari sampah akan membuat konsumen menjadi senang dan mau untuk kembali lagi di lain waktu. Keberadaan tong sampah dan ketersediaannya akan memudahkan bagi pengunjung untuk membuang sampah sehingga tidak berserakan.

4. Ketertiban Pasar

Arti tata tertib ini adalah mengikuti semua aturan utama, dan disiplin juga bertanggung jawab untuk membuat hidup pembeli lebih mudah.

5. Pemeliharaan Gedung

Strategi pengelolaan pasar yang berhasil memerlukan sarana dan prasarana yang baik, seperti drainase yang memadai, kondisi lahan pasar, dan los atau kios. Pedagang dan pengelola pasar dapat melakukan pemeliharaan ini secara efektif.

6. Pasar sebagai Tempat Interaksi Sosial

Pasar berfungsi sebagai tempat berkumpulnya orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain.

7. Pelayanan Pelanggan

Pedagang yang menyediakan layanan pelanggan sangat menyadari pentingnya memastikan bahwa pelanggan terus merasa terdorong untuk berbelanja di pasar. Situasi ini didukung oleh lingkungan sosial yang positif bebas dari faktor negatif seperti penipuan dan kualitas harga yang sebanding dengan kualitas barang yang dijual untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

2.4. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul penelitian	Perguruan Tinggi
Monika Salestri	Peran Pemerintah dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Pasar Tradisional, Studi Kasus : Pasar Tradisional Piyungan di Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Faldi M Ichsan	<i>UN GOVERNABILITY STATE</i> (Evaluasi Fungsi Pemerintah Kota Tasikmalaya Pada Optimalisasi Fungsi Depo Pasar Ikan Tasikmalaya Sebagai Basis Pelayanan Pemasaran Produk Perikanan)	Universitas Siliwangi Tasikmalaya

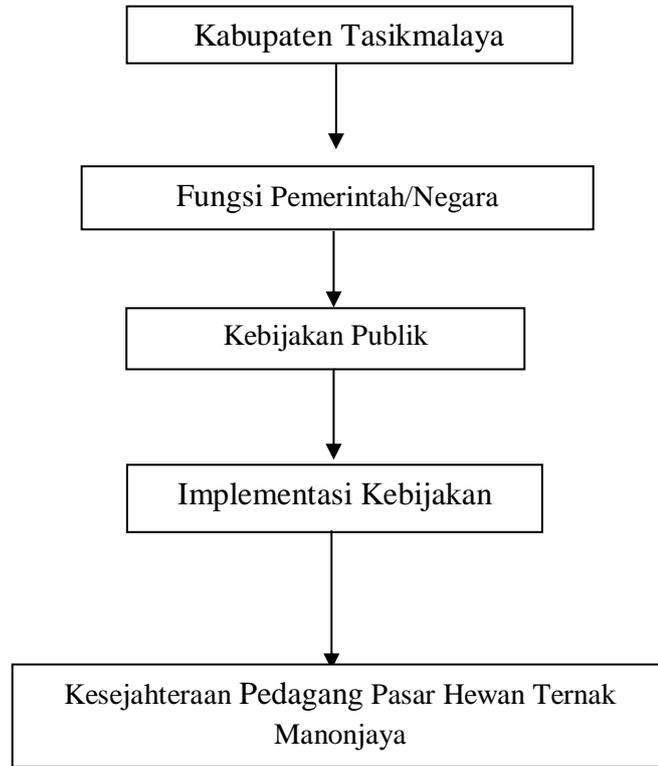
1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

Pada hasil penelitian pertama menyimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan pengalokasi sumber daya adalah tiga cara yang dapat mempengaruhi daya saing pasar tradisional. Salah satu indikator nyata kegiatan perekonomian suatu daerah adalah adanya pasar, khususnya pasar tradisional. Hasilnya, pasar tradisional Piyungan dalam studi ini merupakan salah satu dari sekian banyak pasar tradisional yang direvitalisasi untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Persamaan penelitian sebelumnya dengan dengan penelitian ini diantaranya adalah objek yang diteliti sama sama tentang pasar tradisional, jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Untuk perbedaannya antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti sebelumnya adalah Pasar Piyungan Yogyakarta, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Pasar Hewan Ternak Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam penelitian kedua, hasilnya adalah telah terjadi penurunan pelayanan dari pemerintah yakni dari segi kualitas maupun sebagian dari kantor pusat dan pendukung di Depo Pasar Ikan. Fungsi dan aksesibilitas Depo Pasar Ikan bukanlah tujuan utama relokasi pasar Pemkot Tasikmalaya. sehingga pelaksanaan pelayanan pemerintah di Depo pasar ikan kurang memadai. Persamaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada teori kebijakan publik yang digunakan dan juga pasar tradisional yang digunakan sebagai objek penelitian. Kemudian perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian sebelumnya yakni membahas konsep *good governance* dengan pelayanan publik sebagai konsep utama, sedangkan dalam penelitian ini fokus utama yang disoroti adalah konsep implementasi kebijakan

model analisis Merilee S Grindle untuk membedah permasalahan serta perbedaan pada lokasi penelitian yang ditetapkan pada masing-masing penelitian.

2.6. Kerangka Pemikiran



Kerangka pikir berangkat dari rumusan masalah penelitian yang dikembangkan sesuai dengan kerangka teori yang sudah dibangun. Kerangka pemikiran ini menjadi pijakan untuk menganalisis data dan juga fenomena yang terjadi pada saat penelitian serta dijadikan juga batasan penelitian agar tidak melebar. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam konteks penelitian sudah mengeluarkan kebijakan untuk dapat menangani permasalahan yang ada di pasar hewan ternak Manonjaya. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengelolaan pasar hewan di Kabupaten Tasikmalaya dibuat untuk dapat mengatur tentang tata cara pemanfaatan dan pengelolaan Pasar Hewan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan

menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Pasar Hewan yang dimiliki. Dengan adanya peraturan tersebut juga diharapkan dapat memberikan pelayanan pemenuhan hak para pedagang hewan ternak di Pasar Hewan Manonjaya serta memfasilitasi segala kebutuhan yang ada didalamnya. Kemudian untuk dapat menangani dan mengatasi fenomena PMK yang terjadi di Indonesia Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2014 tentang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kemudian dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang protokol kesehatan pengendalian penyakit mulut dan kuku. Dalam rangka mengendalikan lalu lintas hewan ternak, tertuang juga didalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengendalian lalu lintas hewan rentan penyakit mulut dan kuku dan produk hewan rentan penyakit mulut dan kuku berbasis kewilayahan.

Keberadaan Pasar Hewan Manonjaya saat ini mengalami penurunan penjualan dibandingkan tahun tahun sebelumnya karena beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti adanya fenomena PMK (penyakit mulut dan kuku) yang menyerang hewan ternak seperti sapi dan kerbau pada tahun ini sehingga masyarakat menjadi enggan dan takut untuk dapat kembali membeli hewan ternak di Pasar Hewan Manonjaya, lemahnya peran pemerintah dalam hal ini seharusnya dapat segera menanggulangi kondisi yang demikian. Selain fenomena tersebut, faktor lain yang menyebabkan turunnya penjualan ini terkait dengan sarana dan prasarana yang mulai terbengkalai dan kurang perhatian dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya itu sendiri sehingga kurang menunjang kepada kegiatan jual beli di pasar hewan Manonjaya dan berpengaruh juga pada kesejahteraan para pedagang di pasar tersebut.

Implementasi kebijakan perlu direalisasikan dengan baik dengan tujuan agar tercipta pasar yang representatif bagi masyarakat. Kondisi pasar yang prima dan memiliki operasional yang baik akan menunjang kepada pertumbuhan ekonomi di masyarakat sehingga akan berpengaruh juga kepada naiknya daya saing pasar. Adapun analisis dan juga pendekatan yang akan dilakukan untuk dapat mengetahui implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terhadap pasar Hewan Ternak Manonjaya adalah dengan menggunakan analisis teori implementasi dari Merilee S. Grindle untuk membedah permasalahan yang ada dengan memuat dua hal pokok yakni materi muatan kebijakan (*content of policy*) dan konteks kebijakan (*context of policy*).